

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur yang dibedakan berdasarkan bidangnya yaitu industri dan non industri. Penelitian ini berfokus pada belanja daerah dalam mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini diambil dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 38 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2017 dengan data penelitian sebanyak 114 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Variabel independen penelitian ini yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah sedangkan variabel dependen penelitian ini yaitu belanja daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur baik untuk Daerah Industri dan Non Industri.

2. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur baik untuk Daerah Industri dan Non Industri.
3. Sedangkan untuk dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh untuk Daerah Industri dan memiliki pengaruh negatif untuk Daerah Non Industri di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

5.2 **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih terdapat kekurangan dan kendala yang menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian. Keterbatasan dari penelitian yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan populasi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Periode penelitian hanya tiga tahun yaitu dari tahun 2015-2017, dikarenakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2018 dan 2019 belum dipublikasikan pada situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil komponen APBD yaitu, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah.
4. Studi ini tidak menganalisis lebih jauh tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk.

5.3 Saran

Adanya keterbatasan penelitian diatas, maka dapat diajukan saran penelitian untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi dari Provinsi seluruh Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data dengan rentan periode waktu penelitan hingga tahun 2019, karena pada tahun 2018 – 2019 tidak mendapatkan data tahun yang disebabkan belum terpublikasinya data tersebut.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah, mengurangi atau mengganti variabel – variabel lain baik ukuran atau jenis – jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan yang dapat mempengaruhi belanja daerah.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih dan mengambil sampel selain Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi JawaTimur.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, R. (2013). *Teori - Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anthony, N., & Govindarajan, V. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 2*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Cholid, N. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darise, N. (2013). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2338-4603; Vol. 2; No. 2.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Patitisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 44-52; Vol. 14; No. 1.
- Gani, W., & Kristanto, B. S. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Jurnal Infestasi*, 115-122; Vol. 9; No. 2.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikramuddin, M. A., & Saputra, H. (2017). Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Visioner dan Strategis*, 69-75; Vol. 6; No. 2.
- Jensen, & Meckling. (1976). The Theory Of The Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3 : 305 - 360.
- Jolianis. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi*, 47-60; Vol. 7; No. 1.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Martunis, Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Analisis Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 52-57; Vol. 7; No. 1.

Mulyati, S., & Yusriadi. (2018). Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Agregat*, 55-56; Vol. 2; No. 1.

Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan. *Assets*, 78-88; Vol.5; No. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Rizki, A., & Hapsari, D. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *E-Proceeding of Management*, 3153; Vol. 2; N0. 3.

Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Emba*, 705-716; Vol. 4; No. 3.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarno, S. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.